

ABSTRAK

Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap peredaran narkotika adalah wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Akan tetapi, berbagai kendala masih dihadapi oleh penyidik dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Mencermati permasalahan masih lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dalam hal ini diangkat dalam sebuah judul “Penegakan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana deskripsi tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jateng?; 2) Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng?; dan 3) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Implementasi, Teori Penegakan Hukum, serta Teori Penanggulangan Kejahatan.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan, meliputi reduksi data, sajian data (*datadisplay*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Deskripsi tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jateng sudah pada tahap meresahkan dan tidak hanya melibatkan golongan dewasa, akan tetapi juga menyentuh kalangan remaja dan anak-anak; 2) Penegakan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dilakukan secara penal dan non penal. Dalam upaya penegakan hukum penegakan secara penal melalui implementasi UU Narkotika masih terdapat permasalahan terkait dengan pendefinisian pada Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pendefinisian pada Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam implementasinya berdampak terhadap penanganan antara pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika.; 3) Faktor-faktor penghambat dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng adalah tidak berimbangnya jumlah personil/sumber daya Diresnarkoba Polda Jateng dengan wilayah, sarana dan prasarana belum memadai khususnya sarana yang berkaitan dengan teknologi (IT), dan yang terpenting adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika.

Kata Kunci: *penegakan, hukum, narkotika*

ABSTRACT

One of the regions in Indonesia which is prone to narcotics distribution is the law area of the Central Java Regional Police. However, various obstacles are still faced by investigators in law enforcement against narcotics crime. Observing the problem of weak law enforcement against narcotics crime, in this case raised in the title "Law Enforcement of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics by the Directorate of Narcotics Investigation in the Central Java Regional Police.

This study aims to 1) What is the description of narcotics crime in the jurisdiction of the Central Java Regional Police ?; 2) How is the law enforcement of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics by the Directorate of Narcotics Investigation in Central Java Police ?; and 3) What factors influence the enforcement of Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics by the Directorate of Narcotics Investigation in Central Java Police?

This study used implementation Implementation Theory, Law Enforcement Theory, and Crime Theory.

The method of approach in this legal research is an empirical juridical approach. Data collection techniques using interviews and document study. The data analysis methods used included data reduction, data display and conclusion drawing / verification

The results showed that 1) The description of narcotics crime in the jurisdiction of the Central Java Regional Police was already at an unsettling stage and not only involved the adult group, but also touched teenagers and children; 2) Law enforcement of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics by the Directorate of Narcotics Investigation of the Central Java Regional Police is carried out both in a penal and non-criminal manner. In the effort to enforce the law enforcement by means of the implementation of the Narcotics Law, there are still problems related to the definition in the General Provisions Chapter of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. In defining the Chapter on General Provisions of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics in its implementation it has an impact on the handling of narcotics addicts, narcotics abuse and victims of narcotics abuse with drug dealers or dealers; 3) Inhibiting factors in the enforcement of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics by the "Directorate of Narcotics Investigation of Central Java Police is the imbalance of the number of personnel / resources of the Central Java Regional Police Directorate of Drugs with regions, facilities and infrastructure inadequate especially facilities related to technology (IT), and most important is the low public awareness of the dangers of narcotics.

Keywords: enforcement, law, narcotics